

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, H.M. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, H.M. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hatta, Muhammad. 2005. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Kolopaking, Anita D.A. 2013. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2016. *Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- N.D, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Halim. 1982. *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerodjo, Irawan. 2013. *Hukum Pertanahan, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Soetikno, Imam. 1990. *Politik Hukum Agraria Nasional: cetakan ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soetikno, Imam. 1994. *Politik Hukum Agraria Nasional: cetakan keempat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

C. Jurnal dan Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 5.56 WIB.

<http://eprints.uny.ac.id/52985/3/BAB%20III%2013405241064.pdf>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2019 Pukul 17.13 WIB.

<http://sumbartoday.net/2018/07/22/tanah-ulyat-di-minangkabau-di-jua-i-indak-di-makan-bali-digadai-indak-dimakan-sando/>, Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2020 Pukul 00.56 WIB.